

SKRIPSI



disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Jurusan Ilmu Ekonomi

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Rusli

Nomor Mahasiswa : 13313258

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Desember 2018

Penulis,



Rusli

PENGESAHAN SKRIPSI

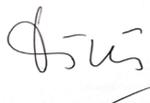
Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

Nama : Rusli
Nomor Mahasiswa : 13313258
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 17 Desember 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Diana Wijayanti, S.E, M.Si.

PENGESAHAN UJIAN

Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

Disusun Oleh : **Rusli**
Nomor Mahasiswa : **13313258**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **15 Januari 2019**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Diana Wijayanti, Dra., M.Si.



.....



Penguji : Suharto, S.E., M.Si

.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

Believe

Selalu percaya dengan apa yang telah diyakini dalam hati, percaya kepada Tuhan, dan percaya kepada diri sendiri.

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ نَافِلًا غَلَوْنَا أَنْتُمْ تَحْزَنُوا وَلَا تَهْتُوا أَلَا وَ

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.

(Ali Imran:139)

Be Patient

Dari sebuah kesabaran akan didapatkan sebuah hasil yang sepadan dari itu.

Allah memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan balasan yang lebih baik dari pada amalnya dan melipat gandakannya tanpa terhitung. Firman-Nya;

ما عندكم ينفد وما عند الله باق و لنجز بين الذين صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

apa yang disimu akan lenyap, dan apa yang ada disisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

(An-nahl:96)

Be Yourself

Hadiah tidak selalu terbungkus dengan indah, terkadang Allah membungkus hadiah itu dengan masalah tetapi didalamnya terdapat berbagai berkah hingga mata bisa melihat dengan jelas, namun hati bisa melihat dengan jujur.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada ALLAH SWT atas rahmatNya skripsi ini
dapat diselesaikan

Karya ini merupakan salah satu dharma baktiku

Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta

Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, kesabaran, dukungan, kepercayaan
dan doa tulus yang selalu dipanjatkan kepadaku

Karya ini kupersembahkan juga kepada angkatan 2013 yang tersayang

Terimakasih telah memberikan keyakinan, canda tawa dalam hidupku dan doa
yang tulus

Kupersembahkan juga karya ini kepada teman-teman seperjuangan yang tiada
pernah hentinya mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat dan dukungan
kepadaku dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena ridhonyalah penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Skripsi ini berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah”.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahNya serta kesehatan yang telah dilimpahkanNya kepada penulis selama menulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. Jaka Sriyana,SE.,M.Si.selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Diana Wijayanti, S.E, M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan dan arahan dari awal hingga selesainya penelitian ini.
4. Dosen, staf pengajar dan karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

5. Ayahanda, Ibunda, Abang dan Kakakku tercinta serta semua keluarga besarku yang telah banyak memberikan do'a, dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Untuk teman-temanku AJ47 serta teman-teman angkatan yang juga telah banyak memberikan do'a, dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. And, thanks for your support, without you I'm nothing dear.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 17 Desember 2018

Penulis,

Rusli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ...	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	iError! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.i
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN DAFTAR ISI	iError! Bookmark not defined.
HALAMAN DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.i
HALAMAN ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.i
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
2.1. Kajian Pustaka	8
2.2. Landasan Teori	11
2.2.1 definisi Kemiskinan	11
2.2.2 Sumber Dan Sebab Terjadinya Kemiskinan.....	13
2.2.3 Ciri-Ciri Kemiskinan	15
2.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan	17
2.2.4.1 Penerimaan Daerah.....	17
2.2.4.2 PDRB	21
2.2.4.3 Upah Minimum Regional.....	23
2.2.4.4 Industri Besar dan Sedang	27
2.3 Hubungan Antar Variabel	31

2.3.1 Hubungan Antara penerimaan Daerah Dengan Tingkat Kemiskinan ..	31
2.3.2 Hubungan antara Tingkat Kemiskinan Dengan PDRB	31
2.3.3 Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Upah Minimum.....	31
2.3.4 Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Jumlah Industri.....	32
2.4 Hipotesis Penelitian	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Jenis dan Pengumpulan Data	33
3.1.1 Jenis Data	33
3.1.2 Cara Pengumpulan Data	33
3.2 Variabel penelitian.....	34
3.2.1 Variabel Dependen (Y).....	34
3.2.2 Variabel Independen (X)	34
3.3 Metode Analisis	35
3.3.1 Uji Stasioner (<i>Unit Root Test</i>)	36
3.3.2 Uji MWD	37
3.3.3 Uji Asumsi Klasik.....	37
3.3.4 Koefisien Determinasi	41
3.3.5 Uji Hipotesis (Uji-F)	42
3.3.6 Uji Hipotesis (Uji-T).....	43
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	44
4.1 Deskripsi Data Penelitian	44
4.2 Hasil dan Analisis	45
4.2.1Pemilihan Model Regresi	45
4.2.2 Hasil Uji Regresi Model Linear	49
4.2.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	49
4.2.4 Uji F	49
4.2.5 Uji T	50
4.2.6 Uji Multikolinieritas	52
4.2.7 Uji Heteroskedastisitas	53
4.2.8 Uji Autokorelasi.....	54

4.2.9 Interpretasi Hasil Regresi	55
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Implikasi	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 1999-2015.....	4
Tabel 4.1 Data variabel	45
Tabel 4.2 Uji Signifikan MWD Untuk Regresi Model Linier.....	47
Tabel 4.3. Hasil Uji MWD Log linear	48
Tabel 4.4 Hasil Regresi Model Linear.....	49
Tabel 4.5 Uji Multikolienaritas.....	52
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas	53
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi.....	54



ABSTRAK

Latar belakang dilakukan penelitian ini bahwa kemiskinan adalah suatu masalah yang kompleks di Indonesia salah satunya di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) , UMR (Upah Minimum Regional), jumlah industri besar dan sedang terhadap Tingkat Kemiskinan tahun 1999 – 2015.

Penelitian ini menggunakan data time series dengan jangka waktu dari tahun 1999 – 2015 yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, dan ditunjang oleh studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Penerimaan Daerah, PDRB, UMR (Upah Minimum Regional), dan jumlah industri besar dan sedang terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah digunakan model regresi linear berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square) dengan menggunakan uji spesifikasi MWD (Mackinnon, White, Davidson). Proses pengujian ekonometrika (asumsi klasik) meliputi Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Sedangkan untuk pengujian yang digunakan terdiri dari pengujian secara statistik meliputi uji t, uji F, dan koefisien determinasi R^2 .

Hasil menunjukkan bahwa variable independent Penerimaan Daerah dan Jumlah industri sedang dan Besar, berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable dependent tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel independent PDRB dan UMR (Upah Minimum Regional), tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variable dependent tingkat kemiskinan.

Kata kunci : Penerimaan Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), UMR (Upah Minimum Regional), dan Jumlah industri Sedang dan Besar.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu hal yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan suatu negara, khususnya masyarakat yang tinggal di suatu negara tersebut. Pembangunan dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan dan melibatkan kegiatan produksi. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 1994). Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktural sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan ekonomi, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengangguran ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan mutlak (Todaro, 1988).

Kemiskinan adalah ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (Mudrajad Kuncoro, 1997). Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Secara umum definisi kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi yang sangat luas ini

menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensiosial, sehingga tidak mudah untuk mengukur kemiskinan dan perlu kesepakatan pendekatan pengukuran yang di pakai (BPS & World Bank).

Kemiskinan sebagai masalah nasional, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Jika ingin berhasil untuk mengatasinya, kemiskinan harus menjadi tanggung jawab bersama bagi semua pelaku pembangunan, termasuk masyarakat itu sendiri. Kunci pemecahan masalah kemiskinan adalah memberi kesempatan kepada penduduk miskin untuk ikut serta dalam proses produksi dan kepemilikan aset produksi. Dalam penanggulangan kemiskinan terdapat prinsip-prinsip yang perlu dijadikan acuan dasar penyelesaian, antara lain, menerapkan sistem ekonomi yang demokratis dengan peran pemerintah sebagai regulator dan eksekutor yang efektif berpihak kepada kaum miskin, pemecahan kemiskinan harus menempatkan kaum miskin sebagai subyek yang di berdayakan, komitmen pemecahan masalah kemiskinan harus secara berkesinambungan dan terintegrasi.

Teori-teori yang berkembang tidak menyinggung masalah kemiskinan secara eksplisit sebagai suatu permasalahan yang memerlukan pendekatan khusus dan penyelesaiannya. Teori pembangunan yakni masalah kemiskinan akan teatasi dengan sendirinya memlalui mekanisme pertumbuhan ekonomi. Bahkan Kuznets berpendapat dbahwa ketimpangan pendapatan merupakan syarat keharusan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi pada awal pertumbuhan ekonomi tingkat kesenjangan ekonomi makin tinggi sampai pada tingkatan tertentu baru menurun.

Indikator-indikator tersebut dirumuskan dengan konkrit yang dibuat oleh BAPPENAS yaitu terbatasnya kecakupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20% penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatan terendahnya hanya mengonsumsi 1.571 kkal per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60 & penduduk berpenghasilan terendah (Bappenas, 2004).

Terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang muncul distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Tujuan Provinsi Jawa Tengah dalam keberhasilan menaggulangi kemiskinan juga sangat baik, dilihat dari perhitungan pada tahun 1999-2015 mengalami penurunan. Terlihat dari tingkat kemiskinan

yang masih relatif tinggi yaitu diatas 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah masih belum bisa memaksimalkan penekanan terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999-2015

Tahun	Penduduk (ribu orang)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase (%)
1999	30.761,22	8.755,40	28,46
2000	30.775,84	8.254,20	26,82
2001	31.063,81	7.946,80	25,58
2002	31.691,86	7.038,30	22,21
2003	32.052,84	6.979,80	21,78
2004	32.397,43	6.843,80	21,12
2005	32.908,85	6.533,50	20,35
2006	32.177,73	7.100,60	22,07
2007	32.380,27	6.557,20	20,25
2008	32.626,39	6.122,50	18,77
2009	32.864,56	5.655	17,21
2010	32.382,65	5.217,20	16,11
2011	32.643,61	5.256	16,10
2012	33.270,20	4.863	14,62
2013	33.264,33	4.952	14,89
2014	33.552,66	4.811,30	14,34
2015	33.774,14	4.581,80	13,57

Sumber : BPS dalam angka Jawa Tengah (data diolah)

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan secara terus menerus dalam setiap tahunnya walau pun pertumbuhan penduduk sempat mengalami penurunan jumlah penduduk pada tahun 2005 dengan jumlah 32.908,85 jiwa menjadi 32.177,73 jiwa dalam 2006 dan setelah tahun itu mengalami kenaikan setiap tahunnya, jumlah penduduk terbesar pada tahun 2015 dengan jumlah 33.774,14 jiwa, dan terendah pada tahun 1999 dengan jumlah 30.761,22 jiwa.

Jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah paling tinggi pada tahun 1999 dengan jumlah 8.755,40 jiwa dari jumlah penduduk 30.761,22 atau 28,46% dari jumlah penduduk pada tahun 1999, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah pada tahun 2015 dengan jumlah 4.581,80 atau 13,57% dari total penduduk 33.774,14 jiwa pada tahun 2015.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat membuat peran dan posisi perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia. Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu (Gunawan Sumodiningrat, 1998).

Dari uraian diatas serta pemikiran diatas, maka penulis merasa terdorong untuk mendalami dan meneliti tentang “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian diatas, penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh UMR (Upah Minimum Regional) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Industri Sedang dan Besar terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana pengaruh Penerimaan Daerah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis bagaimana pengaruh UMR (Upah Minimum Regional) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Menganalisis bagaimana pengaruh Jumlah Industri Sedang dan Besar terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan tentang pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Dapat dijadikan kerangka penilaian kearah pembangunan dalam memecahkan masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Wijayanto (2010) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008”. Variabel independen dari penelitian ini adalah PDRB, pendidikan, dan pengangguran, metode yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah analisis panel data (kombinasi data cross section dan time series). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan, variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan, dan variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan

Octaviani (2010) dalam penelitian yang berjudul “Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia”. Tulisannya menganalisis tentang pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel yang digunakan Inflasi, Pengangguran, dan Jumlah Kemiskinan. Analisis yang digunakan adalah model ekonometri yang dilakukan oleh Cutler dan Katz (1991). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel pengangguran mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, sebaliknya jika semakin kecil angka pengangguran maka semakin kecil juga tingkat kemiskinan di Indonesia.

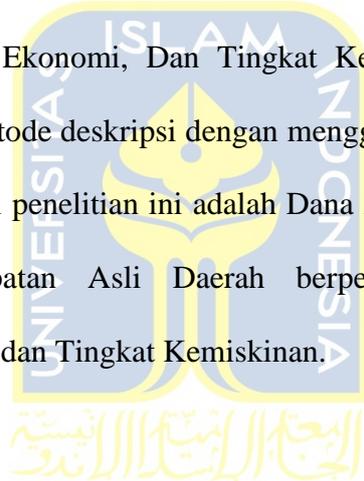
Yanti (2010) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1999-2009”. Variabel independen dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kesempatan kerja. Metode yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah regresi linier berganda yaitu asumsi klasik, dari hasil penelitian ini variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, variabel inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, variabel tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Khabhibi (2011) dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Study Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)”. Variabel yang digunakan Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat pengangguran. Analisis yang digunakan adalah metode Ordinari Last Square (OLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dua variabel yaitu upah minimum dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi Tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Asmara (2012) dengan judul “Dampak Investasi Di Sektor Industri Dalam Mereduksi Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia”. Variabel yang digunakan adalah Jumlah Industri, Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, analisis model data panel, analisis metode CGE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah investasi di sektor industri untuk mereduksi pengangguran

dan kemiskinan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini investasi berpengaruh signifikan, yang artinya semakin banyak investasi yang di terima sektor industri maka akan berpeluang meningkatkan produktivitas atau menambah jumlah industri di sektor yang sama sehingga dapat mereduksi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Anwar (2016) dengan Judul “Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kota Manado 2001-2013”. Variabel yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Tingkat Kemiskinan. Metode penelitian menggunakan yaitu metode deskripsi dengan menggunakan metode data sekunder (time series). Hasil dari penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan.



2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Kemiskinan

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata ”miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba keuangan. Departemen Sosial dan Badan Pusat Statistik mendefinisikan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yang disebut garis kemiskinan (*proverti line*) atau batas kemiskinan (poverty threshold).

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam ukuran kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lainnya seperti tingkat kesehatan dan pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lainnya seperti tingkat pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum. Pada umumnya terdapat dua indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan disuatu wilayah, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Mengukur kemiskinan dengan mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif (Tambunan, 2001).

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan ketidakmampuan seseorang dengan pendapatan yang di perolehnya untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup setiap hari. Kebutuhan minimum tersebut diterjemahkan dalam ukuran finansial (uang). Nilai minimum tersebut digunakan sebagai batas garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil., sehingga dapat ditelusuri kemajuan yang diperoleh dalam menanggulangi kemiskinan pada level absolut sepanjang waktu.

Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Kemiskinan absolut juga merupakan situasi dimana penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari jumlah makanan yang dikonsumsi dibawah jumlah yang cukup untuk menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa). Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan *dibawah USD \$1/hari* dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan *dibawah \$2 per hari*.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan kemiskinan absolut Indonesia merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum energi kalori (2.100 kilo kalori per kapita per

hari) yang dipergunakan tubuh dan kebutuhan dasar minimum untuk sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang (Sudantoko, 2009).

2.2.2 Sumber dan Sebab Terjadinya Kemiskinan.

Menurut Nasikun dalam Chriswardani Suryatami (2005), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a. Proses yang diinduksi kebijakan, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, di reproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya, adalah kebijakan arti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
- b. Dualisme sosio ekonomi, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani sekala besar dan berpotensi ekspor.

- c. Pertumbuhan populasi, prespektif yang didasari teori Malthus, bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur, sedangkan penambahan pangan seperti deret hitung.
- d. Pengelolaan sumber daya dan lingkungan, adalah unsur mismanagemen sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitasnya.
- e. Siklus dan proses alami, kemiskinan terjadi karena siklus alam misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus menerus.
- f. Peminggiran kaum perempuan, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kaum kelas dua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
- g. Faktor budaya dan etnik, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat dan keagamaan.
- h. Intermediasi eksploatif, keberadaan penolong yang menjadi pendorong, seperti rentenir.
- i. Fragmentasi politik internal dan perselisihan sipil suatu kebijakan yang diterapkan disuatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, yang dapat menjadi penyebab kemiskinan.

- j. Proses internasional, sbekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara miskin.

2.2.3 Ciri-ciri Kemiskinan

Menurut Hartomo dan Aziz (1997) mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki beberapa ciri, yaitu :

- a. Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan, faktor peroduksi yang di miliki umumnya sedikikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
- b. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan tidak memperoleh asset-aset produksi dengan kekuatan sendiri.pendapat yang di peroleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. Sementara meereka pun tidak memiliki syarat untuk terpenuhinya keredit perbangkan, seperti jaminan keredit dan lain-lain, yang mengakibatkan mereka berpaling ke lintah darat yang biasanya untuk pelunasanya meminta syarat–syarat berat dan bunga yang amat tinggi.
- c. Tingkat pendidikan golongan miskin ummnya rendah, tidak sampai tamat Sekolah Dasar. Waktu mereka ummnya tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tak dapat menyelesaikan sekolahnya oleh karena membantu orang tuanya mencari nafkah tambahan.

- d. Kebanyakan mereka yang tinggal di daerah pedesaan, dan tidak mempunyai tanah garapan, atau kalau pun ada relative kecil sekali. pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar diluar pertanian tetapi karena bekerja di pertanian berdasarkan musman, maka kesinambungan pekerjaan mereka menjadi kurang terjamin.
- e. Kebanyakan di antara mereka yang hidup di kota yang masih di berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau skill dan pendidikan. Sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan kota sendiri terutama di negara yang sedang berkembang tidak siap menampung gerakan urbanisasi penduduk desa itu. Apabila di negara maju pertumbuhan industri menyertai urbanisasi dan pertumbuhan kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka proses urbanisasi yang terjadi di negara berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga kerja dalam perkembangan industri. Bahkan, sebaliknya perkembangan teknologi di kota-kota negara sedang berkembang justru menampik penyerapan tenaga kerja sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota terdampak dalam kantong-kantong kemelaratan. Menurut Todaro (2007), masyarakat miskin mempunyai ciri sebagai berikut :
1. Perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan.
 2. Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan.
 3. Perbedaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya.
 4. Perbedaan peranan sektor swasta dan negara.

5. Perbedaan struktur industri.
6. Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain.
7. Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

2.2.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan

2.2.4.1 Penerimaan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan berbagai reaksi yang berbeda bagi daerah, ini dikarenakan berbedanya potensi yang dimiliki oleh suatu daerah otonom. Bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ini menjadi anugerah, namun sebaliknya bagi daerah-daerah yang miskin akan sumber daya alam akan dihindangi dengan rasa kekhawatiran. Desentralisasi daerah sudah barang tentu akan memberikan nuansa baru bagi daerah, karena daerah dituntut untuk lebih mandiri dari segi desentralisasi fiskal, daerah lebih dituntut untuk mencari pembiayaan dan arah kebijakan pembangunan sesuai keunggulan lokal dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan.

Namun ini juga menjadi permasalahan baru bagi daerah, kekayaan sumber daya alam yang melimpah akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran. Permasalahan lain juga timbul, dimana terjadinya perdebatan batas-batas wilayah yang notabennya adalah kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Saat ini banyak usulan pemekaran wilayah yang alasan utama adalah memperpendek rentan kendali

dan mempercepat proses pembangunan. Pemekaran wilayah sah-sah saja yang penting dalam koridor meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan membagi kekuasaan. Mungkin alasan desentralisasi fiskal yang termanivestasi dalam wujud dana perimbangan atau bagi hasil yang ditransfer ke daerah menjadi alasan utama terjadinya hal tersebut.

Salah satu desentralisasi fiskal yang ditulis disini adalah mengenai penerimaan daerah. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah atau lebih tepatnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 17 ayat (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sedangkan penerimaan pembiayaan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

A. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 21 menjelaskan komposisi pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana bagi hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- b. DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- c. DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Jenis pendapatan ini adalah merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang pengalokasiannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- a. Dana Alokasi Umum

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

- b. Dana Alokasi Khusus

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

B. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;

- 1) Pencairan dana cadangan
- 2) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 3) Penerimaan Pinjaman Daerah.

2.2.4.2 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah/daerah. Karena keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam memobilisasi sumberdaya yang terbatas adanya sedemikian rupa, sehingga mampu melakukan perubahan structural yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan struktur ekonomi yang seimbang.

A. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini disebut juga pendekatan nilai tambah dimana Nilai Tambah Bruto “NTB” diperoleh dengan cara mengurangi nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap sektor ekonomi.

B. Pendekatan Pendapatan

Pada pendekatan ini, nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan pajak tak langsung netto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha (bunga netto, sewa tanah dan keuntungan) tidak diperhitungkan.

C. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat untuk keperluan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial. Mengingat nilai barang dan jasa dihasilkan dari produksi domestik, total pengeluaran dari komponen-komponen diatas dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor yang dimaksud adalah ekspor neto. Penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

D. Metode Alokasi

Metode ini digunakan jika data suatu unit produksi disuatu daerah tidak tersedia. Nilai tambah suatu unit produksi disuatu daerah tersebut dihitung dengan menggunakan data yang telah dialokasikan dari sumber yang tingkatnya lebih tinggi, misalnya data kabupaten diperoleh dari alokasi data provinsi.

E. Kegunaan PDRB

PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembanguna regional.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapata regional yang disajikan secara berkala akan dapat diketahui:

1. Tingkat pertumbuhan ekomomi
2. Gambaran struktur perekonomian
3. Perkembangan pendapatan perkapita
4. Tingkat kemakmuran masyarakat
5. Tingkat inflasi dan deflasi

2.2.4.3 Upah Minimum Regional

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi.

Menurut Permen no.1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan. Apabila kita merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang (UU) no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

A. Teori Upah Minimum

Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya. Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan (Mankiw, 2006). Menurut Kaufman (2000), tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk menghasilkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum. Menurut

(Hasanuddin Rachman, 2005), tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan secara mikro dan makro. Secara mikro tujuan penetapan upah minimum yaitu:

- a. Sebagai jaringan agar upah tidak merosot
- b. Mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi diperusahaan.
- c. Meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah.

Sedangkan secara makro tujuan penetapan upah yaitu :

- a. Pemerataan pendapatan
- b. Peningkatan daya beli pekerja dan pemerataan kesempatan kerja.
- c. Perubahan struktur biaya industri sektoral.
- d. Peningkatan produktivitas kerja nasional
- e. Peningkatan etos dan disiplin pekerja.
- f. Memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha dalam rangka hubungan bipartite.

Pada awalnya upah minimum ditentukan secara terpusat oleh Departemen Tenaga Kerja untuk region atau wilayah-wilayah diseluruh Indonesia. Dalam perkembangan otonomi daerah, kemudian mulai tahun 2001 upah minimum oleh masing-masing provinsi. Upah Minimum ini dapat dibedakan menjadi upah regional dan upah minimum sektoral.

- a. Upah Minimum Regional

Upah Minimum Regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling

bawah dan bekerja kurang dari satu tahun yang berlaku disuatu daerah tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang upah minimum, upah minimum regional (UMR) dibedakan menjadi dua, yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk.I) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II). Namun sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20, dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka istilah Upah Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II) di ubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UM Kab/Kota).

b. Upah Minimum Sektoral

Upah Minimum Sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektor. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang upah minimum, upah sektoral dibedakan menjadi Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk.I) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk.II).

Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20, dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka terjadi perubahan istilah menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kab/Kota).

Variabel-variabel yang mempengaruhi upah minimum regional (UMR) Tingkat II dan II sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, adalah sebagai berikut : kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, tingkat upah pada umumnya yang berlaku didaerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-17/Men/VIII/2005 Komponen dan Pelaksanaan Tahap Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak serta sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003 Pasal 88 (4) tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah minimum antara lain didasarkan pada tahap pencapaian KHL, pertumbuhan PDRB, produktivitas, dan mempertimbangkan keberadaan sektor marginal (usaha yang paling tidak mampu). Pada pelaksanaannya, pertimbangan pada usaha tidak mampu ternyata belum dapat dioperasionalkan.

2.2.4.4 Industri Sedang dan Besar

Definisi dan pengertian industri Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

A. Jenis/macam-macam industri berdasarkan tempat bahan baku.

1. Industri ekstraktif Industri ekstraktif adalah industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar. Contoh : pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain lain.
2. Industri nonekstraktif Industri nonekstraktif adalah industri yang bahan baku didapat dari tempat lain selain alam sekitar.
3. Industri fasilitatif Industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya. Contoh : Asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya.

B. Golongan/macam-macam industri berdasarkan besar kecil modal

1. Industri padat modal adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya.
2. Industri padat karya adalah industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.

C. Jenis/macam-macam industri berdasarkan klasifikasi atau penjenisannya berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986

1. Industri kimia dasar contohnya seperti industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dsb.

2. Industri mesin dan logam dasar misalnya seperti industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dll.
3. Industri kecil
Contoh seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah, dll.
4. Aneka industri misal seperti industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.

D. Jenis/macam-macam industri berdasarkan jumlah tenaga kerja.

1. Industri rumah tangga adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang.
2. Industri kecil adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 5-19 orang.
3. Industri sedang atau industri menengah adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang.
4. Industri besar adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 100 orang atau lebih.

E. Pembagian/penggolongan industri berdasarkan pemilihan lokasi.

1. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (market oriented industry) adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di mana konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar akan semakin menjadi lebih baik.

2. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja / labor (man power oriented industry) adalah industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk karena biasanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak pekerja / pegawai untuk lebih efektif dan efisien.
3. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku (supply oriented industry) adalah jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan baku berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar.

F. Jenis/macam-macam industri berdasarkan produktifitas perorangan.

1. Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya adalah hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.
2. Industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya adalah pemintalan benang sutera, komponen elektronik, dan sebagainya.
3. Industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Menurut Kartasapoetra (2000), Pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan

atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perkeleyasaan industri.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan antara Penerimaan Daerah Dengan Tingkat Kemiskinan

Menurut Arsyad (2010), setiap kegiatan perekonomian dapat menyisakan sejumlah proporsi tertentu dari penerimaan daerah untuk dapat meningkatkan laju perekonomian dengan cara melakukan investasi-investasi untuk penambahan stok penerimaan daerah.

2.3.2 Hubungan antara Tingkat Kemiskinan dengan PDRB

Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Thamrin, 2001). Bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat pula, dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan disuatu daerah.

2.3.3 Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Upah Minimum

Tujuan utama ditetapkanya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh pada besarnya tingkat pengangguran yang ada .

Semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada pengurangan penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut (Kaufman dan Hotchkiss, 1999).

Menurut Mankiw (2003), upah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran berpengaruh kepada kemiskinan. Selain itu, upah juga merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya.

2.3.4 Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Jumlah Industri Sedang dan Besar

Arsat (2009), pembangunan industri dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor seperti sektor perdagangan, sektor pertanian, atau pun sektor jasa. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya jumlah industri disuatu daerah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang secara tidak langsung dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di suatu daerah.

2.4 Hipotesis Penelitian

1. Diduga Penerimaan Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
2. Diduga PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Diduga UMR (Upah Minimum Regional) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

4. Diduga Jumlah Industri Sedang dan Besar berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

3.1.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dibuat oleh pihak lain yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari suatu sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series*. Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Jenis data yang tersedia harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu penelitian. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menentukan lokasi penelitian di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data sekunder selama tujuh belas tahun.

3.1.2 Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dari penelitian ini bersumber dari:

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2016.
2. Studi pustaka yaitu dengan mempelajari teori dari buku-buku dengan melakukan analisis yang sesuai dengan penelitian ini.
3. Sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel independen.

3.2.1 Variabel Dependen (Y)

Tingkat Kemiskinan (M) adalah Y

Merupakan persentase banyaknya kemiskinan yang terjadi di Daerah di Provinsi Jawa Tengah per tahun. Data diambil dari tahun 1999 – 2015 yang berasal dari BPS Jawa Tengah.

3.2.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat kategori yaitu:

- a. Penerimaan Daerah (PD) adalah X1

Merupakan total banyaknya penerimaan Daerah di Provinsi Jawa Tengah per tahun. Data diambil dari tahun 1999 – 2015 yang berasal dari BPS Jawa Tengah.

- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah X2

Merupakan total produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2000 di Provinsi Jawa Tengah . Data diambil dari tahun 1999 – 2015 yang berasal dari BPS Jawa Tengah.

- c. Upah Minimum Regional (UMR) adalah X3

Merupakan jumlah Upah Minimum yang diterima oleh para pekerja di Provinsi Jawa Tengah. Data diambil dari tahun 1999 – 2015 yang berasal dari BPS Jawa Tengah.

d. Jumlah Industri Besar dan Sedang (IN) adalah X4

Merupakan total dari jumlah industri besar dan sedang yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang diambil dari tahun 1999 – 2015 yang berasal dari BPS Jawa Tengah.

Variabel dependent yang digunakan adalah Tingkat Kemiskinan (persen), sedangkan variabel independen adalah X1 : Pendapatan Daerah (miliar rupiah), X2: PDRB (miliar juta rupiah), X3 : UMR (ribu rupiah), dan X4 : Jumlah Industri Besar Sedang (dalam satuan unit).

3.3 Metode Analisis

Dalam Penelitian ini metode yang digunakan yaitu dengan model regresi linear berganda. Model dasar yang digunakan dari persamaan estimasi adalah model OLS (*Ordinary Least Squares*). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Pendapatan Daerah, PDRB, UMR (Upah Minimum Regional), Jumlah Industri Sedang dan Besar terhadap tingkat kemiskinan, maka digunakan analisis regresi berganda sebagai analisis yang tepat dengan menggunakan uji spesifikasi MWD (Mackinnon, White, dan Davidson). Untuk menentukan bentuk suatu fungsi model empirik dimana perbandingan hasil regresi model linier lebih baik dari pada model log linier atau sebaliknya. Maka dari itu formulasi regresi linear berganda dari model linear ini adalah sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Keterangan :

- Y = Tingkat Kemiskinan (%)
- X1 = Penerimaan Daerah (miliar rupiah)
- X2 = PDRB ADHK 2000 (miliar rupiah)
- X3 = UMR (ribu rupiah)
- X4 = Jumlah Industri Sedang dan Besar (unit)

Adapun bentuk umum regresi berganda linier dalam perumusan model sebagai berikut : $Y = \beta_0 + \beta_1 PD + \beta_2 PDRB + \beta_3 UMR + \beta_4 IN + e$

Dimana e : variabel pengganggu/error

3.3.1 Uji Stasioner (*Unit Root Test*)

Metode uji stasioner data ini bertujuan untuk menguji data tersebut stasioner atau nonstasioner. Ujistasioner telah berkembang pesat dikarenakan adanya perhatian para ahli ekonometrika terhadap ekonometrika *time series*. Metode yang akhir-akhir ini sering digunakan oleh para ahli ekonometrika dalam menguji stasioner data adalah uji akar-akar unit (*unit root test*). Uji akar unit pertama kali dikembangkan oleh Dickey-Fuller dan dikenal dengan uji akar unit Dickey-Fuller (DF). Pada data *time series* yang tidak stasioner berarti mempunyai regresi lancung, untuk menghindari masalah regresi lancung yaitu harus mentransformasikan data nonstasioner menjadi data stasioner. Uji stasioneritas dapat dilakukan menggunakan cara uji akar unit (*Unit Root Test*) bisa dengan ADF (*Augmented Dickey-Fuller*) maupun uji PP (*Philips-Perron*) dengan membandingkan probabilitas ADF *test statistic* maupun PP *test statistic* dengan tingkat kesalahan (α) pada tingkat tertentu.

3.3.2 Uji MWD

Uji Mackinnon, White and Davidson (MWD) bertujuan untuk menentukan apakah model yang akan digunakan berbentuk linear atau log linear agar mendapatkan hasil regresi terbaik. Persamaan matematis untuk model regresi linier dan regresi log linier adalah sebagai berikut :

$$\text{Linier} \rightarrow Y = \beta_0 + \beta_1 \text{PD} + \beta_2 \text{PDRB} + \beta_3 \text{UMR} + \beta_4 \text{IN} + e$$

$$\text{Log Linier} \rightarrow \text{Log}(Y) = \text{Log}\beta_0 + \beta_1 \text{Log}(\text{PD}) + \beta_2 \text{Log}(\text{PDRB}) + \beta_3 \text{Log}(\text{UMR}) + \beta_4 \text{Log}(\text{IN}) + \mu$$

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa :

1. H_0 : Y adalah fungsi linier dari variable independen X (model linear)
2. H_1 : Y adalah fungsi log linier dari variabel independen X (model Log linear).

3.3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi kalasik ialah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis linier berganda dalam OLS dengan tujuan model regresi tidak bias atau model regresi BLUE. Proses analisis yang akan dilakukan terdiri dari pengujian variabel-variabel bebas secara individu, yaitu pengujian signifikan variabel secara individual, pengujian variabel-variabel penjelas (independen) secara bersama-sama serta perhitungan pengujian asumsi klasik dari regresi persamaan penerimaan pajak Daerah.

Penaksiran yang bersifat BLUE (*best linier unbiased estimator*). Yang diperoleh dari OLS (*Ordinary Least Square*) harus memenuhi seluruh asumsi-asumsi klasik, sebagai berikut :

A. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana terjadi kolerasi yang kuat diantara variabel-variabel bebas (X) yang diikutsertakan dalam pemberontakan model regresi linier. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai R^2 , F hitung serta T hitung. Namun berdasarkan uji F secara statistik signifikan berarti semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Asumsi model regresi klasik adalah bahwa tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel yang menjelaskan termasuk dalam model. Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang “sempurna” atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi.

B. Uji Heteroskadasitas

Heteroskadasitas gejala dimana semua variabel pengganggu tidak mempunyai varian yang sama atau penyimpangan asumsi OLS dalam bentuk varian gangguan estimasi yang dihasilkan oleh asumsi OLS tidak bernilai konstan. Model regresi dengan heteroskadasitas mengandung konskuensi serius pada estimator metode OLS karena tidak lagi BLUE, maka untuk metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskadasitas pada peneliti ini adalah pengujian White, adapun langkah-langkah pengujiannya antara lain: $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$ et

1. Estimasi persamaan dan dapatkan residualnya

2. Lakukan regresi pada persamaan yang disebut dengan regresi *auxiliary*

a. Regresi *auxiliary* tanpa perkalian antar variabel independen (*no cross terms*) $\hat{\epsilon}_i^2 = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1i} + \alpha_2 X_{2i} + \alpha_3 X_{2i}^2 + \alpha_4 X_{2i}^2 + v_i$

b. Regresi *auxiliary* dengan perkalian antar variabel independen (*cross terms*)

$$\hat{\epsilon}_i^2 = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1i} + \alpha_2 X_{2i} + \alpha_3 X_{2i}^2 + \alpha_4 X_{2i}^2 + \alpha_4 X_{1i} X_{2i} + v_i$$

Dimana $\hat{\epsilon}_i^2$ merupakan residual kuadrat yang kita peroleh dari persamaan. Jika kita mempunyai lebih dari dua variabel independen dalam persamaan (*no cross terms*) maupun (*cross terms*) akan lebih banyak. Dari persamaan (*no cross terms*) dan (*cross terms*) kita dapatkan nilai koefisien determinasi (R^2).

3. Hipotesis nol dalam uji ini adalah tidak ada heterokedastitas. Uji White didasarkan pada jumlah sampel (n) dikalikan dengan R^2 yang akan mengikuti distribusi Chi-squares dengan *degree of freedom* sebanyak variabel independen tidak termasuk konstanta dalam regresi *auxiliary*. Nilai hitung statistic Chi-squares (x^3) dapat dicari dengan formula sebagai berikut: $nR^2 = X^2 df$

4. Jika nilai Chi-square hitung ($n.R^2$) lebih besar dari nilai X^2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka ada menunjukkan heterokedastitas dan sebaliknya jika Chi-square hitung lebih kecil dari nilai X^2 kritis menunjukkan tidak adanya heterokedastitas.

C. Uji Autokolerasi

Autokolerasi berarti adanya kolerasi antara anggota observasi satu dengan yang observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode OLS, Autokolerasi merupakan kolerasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lainnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi ini dapat dilakukan dengan metode Breusch Godfrey mengembangkan uji autokolerasi yang lebih umum dan dikenal uji Langrange Multiplier (LM). Untuk memahami uji LM, pada model regresi linier berganda:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3.$$

Dan dapat di uji melalui hipotesis nol tidak adanya autokolerasi dalam model sebagai berikut:

1. $H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_p = 0$
2. $H_a : \rho_1 \neq \rho_2 \neq \dots = \rho_p \neq 0$

Jika gagal menolak H_0 maka dikatakan tidak ada autokolerasi dalam model. Adapun prosedur dari uji LM adalah sebagai berikut :

1. Estimate persamaan dengan model OLS dan kita dapatkan residualnya.
2. Melakukan regresi residual dengan variabel bebas X_t

$$\hat{\epsilon}_t = \lambda_0 + \lambda_1 X_t + \rho_1 \hat{\epsilon}_{t-1} + \rho_2 \hat{\epsilon}_{t-2} + \dots + \rho_p \hat{\epsilon}_{t-p} + v_t$$

Kemudian dapatkan R^2 dari persamaan.

3. Jika sampel adalah besar, maka menurut Breusch dan Godfrey maka model dalam persamaan akan distribusi chi-squares dengan df

sebanyak p yaitu panjang kelambanan residual dalam persamaan. Nilai hitung statistik chi-squares dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut : $nR^2 \sim \chi_p^2$

Jika nR^2 yang merupakan chi-squares (X^2) hitung lebih besar dari nilai kritis chi-squares (X^2) pada derajat tertentu (α), menolak hipotesis nol H_0 . Ini menunjukkan adanya autokolerasi. Penentuan ada atau tidaknya autokolerasi bisa juga dilihat dari nilai probabilitas chi-squares. Jika nilai probabilitas chi-squares lebih besar dari nilai α yang dipilih maka menolak H_0 yang artinya tidak ada autokolerasi. Sebaliknya jika nilai probabilitas chi-squares lebih kecil dari nilai α maka menerima H_0 yang artinya terdapat autokolerasi.

3.3.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) menjelaskan data yang digunakan untuk menghitung presentase total variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Atau dengan kata lain koefisien regresi menerangkan bagaimana garis regresi yang dibentuk sesuai dengan datanya. Pengujian ini untuk mengetahui derajat berapa besar keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Besaran R^2 terletak antara 0 dan 1, jika $R^2 = 1$ berarti semua variasi dalam terikat (Y) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas (X) yang digunakan model regresi, sebesar 100%. Jika $R^2 = 0$ berarti tidak ada variasi dalam variabel (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas (X). R^2 antara 0 - 1, model ini dikatakan lebih baik jika mendekati 1 (satu).

3.3.5 Uji Hipotesis (Uji-F)

Mengevaluasi untuk mengetahui variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat secara signifikan, maka pengujian dilakukan dengan uji F-test

- A. $H_0 : \beta_i = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya variabel bebas tidak mempunyai variabel terikat
- B. $H_a : \beta_i \neq 0$, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

Dengan derajat keyakinan tertentu, maka jika

1. Jika $F\text{-hitung} < F\text{ tabel}$, maka H_0 diterima yang berarti secara bersama-sama variabel bebas secara signifikan tidak terpengaruh variabel terikat.
2. Jika $F\text{-hitung} > F\text{ tabel}$, maka H_0 ditolak yang berarti secara bersama-sama variabel bebas secara signifikan mempengaruhi variabel terikat.

Pengujian terakhir yaitu mengukur kesetaraan hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas terhadap suatu himpunan data hasil pengamatan, yang serius disebut koefisien determinasi (R^2). Sehingga semakin tinggi R^2 maka semakin erat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.3.6 Uji Hipotesis (Uji-T)

Pengujian ini merupakan pengujian secara individu pada variabel bebas, yang dimaksudkan untuk mengetahui signifikan dari pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu. Langkahnya sebagai berikut:

- A. $H_0 : \beta_i = 0$, artinya variabel bebas secara individu tidak mempengaruhi variabel terikat

B. $H_a : \beta_i > 0$, artinya variabel bebas secara individu mempengaruhi variabel terikat secara positif

Dengan derajat keyakinan tertentu, maka jika :

1. $t\text{-hitung} < t\text{ tabel atau } P\text{ value} > \alpha$ maka H_0 diterima H_a ditolak, artinya secara individu tidak ada pengaruh yang berarti antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. $t\text{-hitung} > t\text{ tabel atau } P\text{ value} < \alpha$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara individu terdapat pengaruh yang berarti antara variabel bebas terhadap 2 variabel terikat.



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

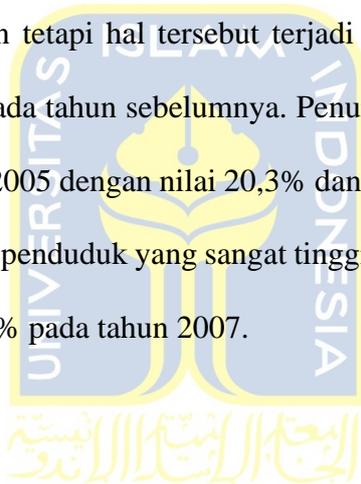
Dalam penelitian dan analisis dari data-data penelitian yang telah diolah menggunakan E-Views, serta diikuti dengan pembahasan dari hasil pengolahan data.

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* yang merupakan data tahunan secara berkala. Data yang dipakai dalam penelitian ini

adalah tingkat kemiskinan, penerimaan daerah, PDRB, upah minimum regional, dan jumlah industri besar sedang dari Provinsi Jawa Tengah tahun 1999–2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variable independen atau penjelas berpengaruh terhadap variable dependen atau terikat.

Pada tabel dibawah menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Dimana penurunan yang paling rendah terjadi pada tahun 2015 dengan nilai 13,5%. Bila dilihat pada data dibawah tingkat kemiskinan terjadi pada tahun 1998 dengan angka 28,4% hal tersebut disebut tinggi bila untuk ukuran sebuah angka kemiskinan, akan tetapi hal tersebut terjadi tidak terlepas dari efek krisis ekonomi yang terjadi pada tahun sebelumnya. Penurunan pasca kejadian tahun itu berlanjut hingga tahun 2005 dengan nilai 20,3% dan naik lagi 20.6 persen hal ini di akibatkan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Meski tahun setelah itu turun kembali pada nilai 20,2% pada tahun 2007.



Tabel 4.1
Data Tingkat Kemiskinan, Penerimaan Daerah, PDRB, Upah Minimum Regional, Jumlah Industri Besar Sedang Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Penerimaan Daerah (juta rupiah)	PDRB (juta rupiah)	Upah Minimum Regional (ribu rupiah)	Jumlah Industri Besar Sedang (unit)
1999	28,46	886.260	83.628.000.000	153.000	3.744
2000	26,82	1.081.631	100.000.000.000	185.000	3.155
2001	25,58	1.508.025	105.384.000.000	247.000	3.572
2002	22,21	1.904.806	107.275.000.000	314.500	3.537
2003	21,78	2.403.289	112.612.000.000	340.400	3.399

2004	21,12	2.883.599	118.398.000.000	365.000	3.476
2005	20,35	3.526.839	133.243.000.000	390.000	3.544
2006	22,07	3.814.479	139.016.000.000	450.000	5.537
2007	20,25	4.367.206	145.345.000.000	500.000	5.168
2008	18,77	5.203.027	152.627.000.000	547.000	4.678
2009	17,21	5.696.660	154.062.000.000	575.000	4.213
2010	16,11	6.229.527	162.285.000.000	660.000	3.887
2011	16,1	7.038.908	172.351.000.000	675.000	3.850
2012	14,62	11.649.479	184.078.000.000	765.000	3.736
2013	14,89	13.343.358	195.556.000.000	914.275	3.666
2014	14,34	15.157.460	209.991.000.000	1.006.603	3.851
2015	13,57	17.097.686	220.081.000.000	1.224.532	3.715

Sumber : BPS dalam angka Jawa Tengah (data diolah)

4.2 Hasil dan Analisis

4.2.1 Pemilihan Model Regresi

Pada penelitian ini penentuan spesifikasi model regresi yang digunakan apakah menggunakan model linear atau log linear didasarkan pada uji linear berganda. Pemilihan model regresi dengan menggunakan uji Mackinnon, White and Davidson (MWD) bertujuan untuk menentukan apakah model yang akan digunakan berbentuk linear atau log linear agar mendapatkan hasil regresi terbaik. Persamaan matematis untuk model regresi linier dan regresi log linier adalah sebagai berikut :

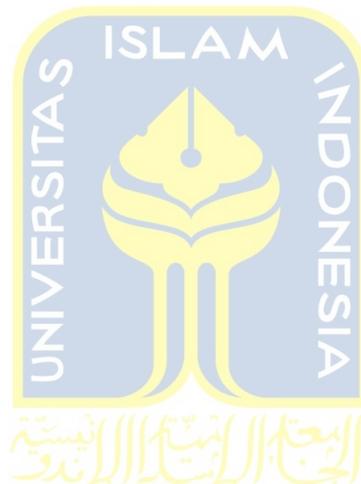
$$\text{Linier} \rightarrow M = \beta_0 + \beta_1 \text{PD} + \beta_2 \text{PDRB} + \beta_3 \text{UMR} + \beta_4 \text{IN} + e$$

$$\begin{aligned} \text{Log Linier} \rightarrow \text{Log}(M) &= \text{Log}\beta_0 + \beta_1 \text{Log}(\text{PD}) + \beta_2 \text{Log}(\text{PDRB}) + \beta_3 \text{Log}(\text{UMR}) \\ &+ \beta_4 \text{Log}(\text{IN}) + \mu \end{aligned}$$

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa :

H_0 : Y adalah fungsi linier dari variable independen X
(model linear)

H_1 : Y adalah fungsi log linier dari varibel independen X
(model log linear)



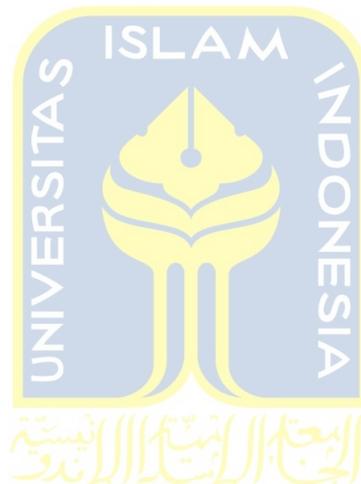
Tabel 4.2
Uji Signifikansi MWD Untuk Regresi Model Linear

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/04/18 Time: 00:48
Sample: 1999 2015
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3394.738	398.0070	8.529341	0.0000
X1	8.72E-05	2.63E-05	3.315955	0.0069
X2	-10.57670	5.718534	-1.849547	0.0914
X3	-1.489430	0.673307	-2.212113	0.0490
X4	0.118884	0.055351	2.147832	0.0549
Z1	1891.756	1608.140	1.176363	0.2643
R-squared	0.958232	Mean dependent var		1966.176
Adjusted R-squared	0.939246	S.D. dependent var		453.5474

S.E. of regression	111.7920	Akaike info criterion	12.54172
Sum squared resid	137472.0	Schwarz criterion	12.83580
Log likelihood	-100.6046	Hannan-Quinn criter.	12.57095
F-statistic	50.47128	Durbin-Watson stat	0.786120
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan dari hasil regresi tersebut, Nilai probabilitas untuk Z1 adalah sebesar $0,2643 >$ pada taraf $\alpha = 5\%$ maka menolak H_0 atau menerima H_a . Dengan demikian maka Z1 tidak signifikan secara statistik melalui uji t, pada model regresi linier, artinya model linear bias digunakan dalam mengestimasi persamaan regresi.



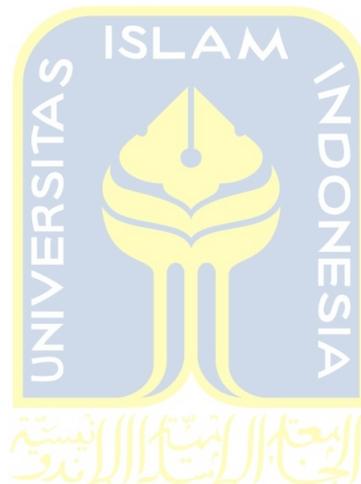
Tabel 4.3
Hasil Uji MWD log linear

Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 12/04/18 Time: 00:50
Sample: 1999 2015
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.620630	0.086501	88.09918	0.0000
LOG(X1)	0.045083	0.002672	16.87136	0.0000
LOG(X2)	-0.124791	0.021639	-5.766900	0.0001
LOG(X3)	-0.428368	0.011214	-38.20050	0.0000
LOG(X4)	0.307230	0.008332	36.87343	0.0000
Z2	-0.000555	3.61E-05	-15.37558	0.0000
R-squared	0.999725	Mean dependent var	7.559092	
Adjusted R-squared	0.999600	S.D. dependent var	0.229066	
S.E. of regression	0.004580	Akaike info criterion	-7.663696	
Sum squared resid	0.000231	Schwarz criterion	-7.369620	

Log likelihood	71.14141	Hannan-Quinn criter.	-7.634464
F-statistic	8002.612	Durbin-Watson stat	2.470530
Prob(F-statistic)	0.000000		

Pada hasil uji regresi MWD untuk model log linear dapat kita ketahui bahwa semua variabel signifikan terhadap α 5%, sedangkan nilai probabilitas Z2 adalah $0.0000 < \alpha$ 5% maka signifikan atau menerima Ho atau menolak Ha. Dengan demikian maka Z2 signifikan secara statistik melalui uji t, pada model regresi log linier, artinya model log linear tidak bisa digunakan dalam mengestimasi persamaan regres



4.2.2 Hasil Uji Regresi Model Linear

Tabel 4.4
Hasil Regresi Model Linear

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/04/18 Time: 00:40
Sample: 1999 2015
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3475.906	398.2000	8.729047	0.0000
X1	9.42E-05	2.60E-05	3.620745	0.0035
X2	-11.98256	5.680993	-2.109238	0.0566
X3	-1.418262	0.681223	-2.081935	0.0594
X4	0.129349	0.055498	2.330689	0.0380

R-squared	0.952977	Mean dependent var	1966.176
Adjusted R-squared	0.937303	S.D. dependent var	453.5474
S.E. of regression	113.5658	Akaike info criterion	12.54257
Sum squared resid	154766.3	Schwarz criterion	12.78763
Log likelihood	-101.6119	Hannan-Quinn criter.	12.56693
F-statistic	60.79846	Durbin-Watson stat	1.276255
Prob(F-statistic)	0.000000		

4.2.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independent. Nilai *Adjusted R²* hasil estimasi menunjukkan nilai sebesar 0.953, yang berarti bahwa 95.3% variasi variabel dependen Tingkat Kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi variabel independent Penerimaan Daerah, PDRB, Upah Minimum Regional, dan jumlah industri besar dan sedang sedangkan sisanya yaitu 4.7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

4.2.4 Uji F

Uji F ini digunakan untuk menguji variabel independent secara keseluruhan dan bersama-sama, apakah variabel independent mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai Probabilitas (F-statistik) dengan tingkat signifikansi (0.05), terlihat bahwa probabilitas (F-statistik) lebih kecil dari tingkat signifikansi (0.05) yaitu variabel sebesar $0.0000 < 0.05$, dengan demikian variabel independent (Penerimaan Daerah, PDRB, Upah Minimum Regional, dan jumlah industri besar dan sedang) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan.

4.2.5 Uji t

1. Uji t-statistik Koefisien Variabel Penerimaan Daerah (PD)

- a. $H_0 : \beta_1 = 0$, artinya variabel bebas secara individu tidak mempengaruhi variabel terikat.
- b. $H_a : \beta_1 > 0$, artinya variabel bebas secara individu mempengaruhi variabel terikat secara positif.

Variabel Penerimaan Daerah (PD) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0027 lebih kecil dari taraf α 5%, menerima H_0 yang artinya berpengaruh signifikan. Maka Penerimaan Daerah (PD) Provinsi Jawa Tengah periode 1999-2015 berpengaruh secara signifikan sesuai hipotesis terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

2. Uji t-statistik koefisien Variabel Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB)

- a. $H_0 : \beta_2 = 0$, artinya variabel bebas secara individu tidak mempengaruhi variabel terikat.
- b. $H_a : \beta_2 > 0$, artinya variabel bebas secara individu mempengaruhi variabel terikat secara positif.

Variabel Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.1521 lebih besar dari taraf α 5% maka H_0 ditolak, artinya variabel Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 1999-2015 tidak berpengaruh secara signifikan dan tidak sesuai hipotesis terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

3. Uji t-statistik koefisien Variabel Upah Minimum Regional (UMR)

- a. $H_0 : \beta_2 = 0$ artinya variabel bebas secara individu tidak mempengaruhi variabel terikat

- b. $H_a : \beta_2 > 0$ artinya variabel bebas secara individu mempengaruhi variabel terikat secara positif

Variabel Upah Minimum Regional (UMR) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari taraf α 5% maka H_0 diterima, artinya variabel Upah Minimum Regional (UMR) dari tahun 1999-2015 berpengaruh secara signifikan sesuai hipotesis terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

4. Uji t-statistik koefisien Variabel Jumlah Industri Sedang dan Besar (IN)

- a. $H_0 : \beta_2 = 0$, artinya variabel bebas secara individu tidak mempengaruhi variabel terikat.
- b. $H_a : \beta_2 > 0$, artinya variabel bebas secara individu mempengaruhi variabel terikat secara positif.

Variabel Jumlah Industri Sedang dan Besar (IN) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari taraf α 5% maka H_0 diterima, artinya variabel Jumlah Industri Sedang dan Besar (IN) dari tahun 1999-2015 berpengaruh secara signifikan sesuai hipotesis terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

4.2.6 Uji Multikolinieritas

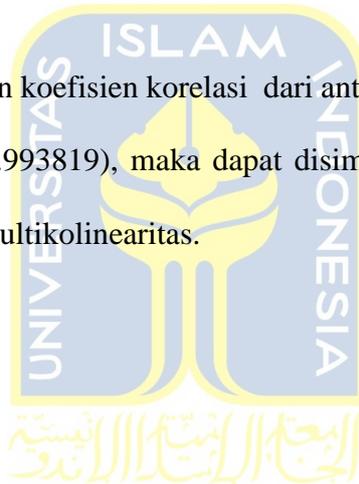
Multikolinieritas digunakan untuk mengukur tingkat hubungan atau pengaruh antar variabel bebas melalui koefisien korelasi (r). Multikolinieritas disini berarti suatu keadaan dimana terdapat hubungan linier antara beberapa variabel independent atau variabel bebas. Variabel bebas yang satu merupakan fungsi yang lainnya. Dengan melihat matrik kolerasi dapat dideteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas pada model. Berdasarkan data hasil regresi

diketahui bahwa nilai R-squared model sebesar 0.993819. Apabila R-squared antar variabel bebas $>$ dari R-squared model maka ada indikasi terdapat multikolinieritas, demikian pula sebaliknya apabila R-squared antar variabel $<$ dari R-squared model maka tidak ada multikolinieritas.

Tabel 4.5
Uji multikolienaritas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.964895	0.964647	-0.000754
X2	0.964895	1.000000	0.989952	0.154610
X3	0.964647	0.989952	1.000000	0.124196
X4	-0.000754	0.154610	0.124196	1.000000

Melihat besaran koefisien korelasi dari antar variabel bebas jauh dibawah R-squared model (0.993819), maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas.



4.2.7 Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi penting dalam model OLS adalah varian dari residual yang konstan atau homoskedastisitas. Apabila residual mempunyai varian yang tidak konstan (heteroskedastisitas) maka estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang BLUE (*best linier unbiased estimator*) tetapi hanya *Linier Unbiased Estimator*. Konsekuensinya apabila estimator tidak mempunyai varian yang minimum maka perhitungan standar error tidak bisa dipercaya kebenarannya dan interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun F

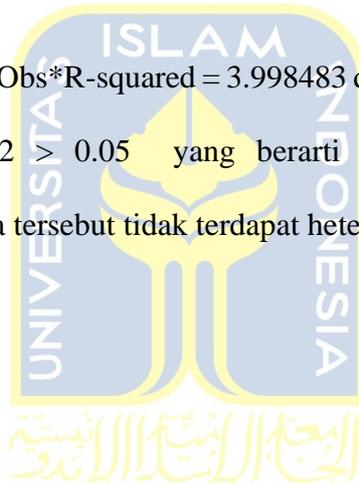
tidak lagi bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas maka peneliti menggunakan metode *White*.

Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.922619	Prob. F(4,12)	0.4825
Obs*R-squared	3.998483	Prob. Chi-Square(4)	0.4062
Scaled explained SS	1.940694	Prob. Chi-Square(4)	0.7467

Pada tabel 4.6. P-Value Obs*R-squared = 3.998483 dan nilai probabilitasnya adalah 0.4062, dimana $0.4062 > 0.05$ yang berarti tidak signifikan maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas.



4.2.8 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan residual yang lain. Salah satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengan residual adalah tidak adanya hubungan residual satu dengan residual yang lain. Apabila didalam model ada autokorelasi maka estimator yang kita dapatkan akan mempunyai karakteristik linier, tidak bias dan estimator metode kuadran terkecil tidak mempunyai varian

yang minimum sehingga menyebabkan perhitungan standar error metode OLS tidak lagi bisa dipercaya. Selanjutnya interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada uji-t maupun uji-F tidak bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi.

Tabel 4.7
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.284467	Prob. F(2,10)	0.3188
Obs*R-squared	3.474589	Prob. Chi-Square(2)	0.1760

Dapat dilihat dari nilai probabilitas. Jika p-value obs*-square $< \alpha$, maka H_0 ditolak, begitu juga sebaliknya jika p-value obs*-square $> \alpha$ maka H_0 diterima. Karena P-Value Obs*R-squared = 3.474589 dan nilai probabilitasnya adalah 0.1760 dimana $0.1760 > \alpha 0.05$ yang berarti tidak signifikan maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat autokorelasi.

4.2.9 Interpretasi Hasil Regresi

1. Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerimaan daerah terhadap tingkat kemiskinan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan yang sesuai dengan hipotesis penelitian. Dari hasil pengolahan data telah didapatkan besarnya nilai koefisien variabel Penerimaan Daerah sebesar 0.0035, artinya apabila Penerimaan Daerah naik 1 juta rupiah, maka tingkat kemiskinan

menurun sebesar 0.0035%. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa Penerimaan Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Menurut BPS, untuk mencari suatu pendapatan perkapita yaitu penerimaan daerah di bagi dengan jumlah penduduk. Jadi dengan hal tersebut penerimaan daerah sangat berpengaruh untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

2. Pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan daerah mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan yang tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan yang terjadi belum menyentuh sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor padat kerja sehingga PDRB tersebut tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan.

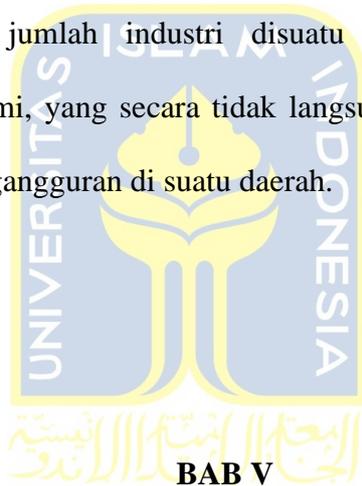
Pengaruh Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh Upah Minimum Regional terhadap tingkat kemiskinan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti UMR tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Dikarenakan kenaikan UMR diikuti dengan kenaikan harga barang pokok.

4. Pengaruh Jumlah Industri Sedang dan Besar Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh Jumlah Industri Sedang dan Besar terhadap tingkat kemiskinan daerah mempunyai hubungan yang positif

dan signifikan yang sesuai dengan hipotesis penelitian. Dari hasil pengolahan data telah didapatkan besarnya nilai koefisien variabel Jumlah Industri Sedang dan Besar sebesar 0.129349, artinya apabila Jumlah Industri Sedang dan Besar (jumlah industri sedang dan besar) naik 1 unit, maka tingkat kemiskinan juga akan turun sebesar 0.129349%. Jumlah Industri Sedang dan Besar dapat kita ketahui setiap tahunnya mengalami naik dan turun. Arsat (2009), pembangunan industri dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor seperti sektor perdagangan, sektor pertanian, atau pun sektor jasa. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya jumlah industri disuatu daerah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang secara tidak langsung dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di suatu daerah.



BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Dari penelitian tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti semakin tingginya suatu penerimaan daerah maka tingkat kemiskinan akan menurun. Hal ini sesuai juga dengan teori bahwa semakin tinggi maka semakin tinggi juga pendapatan perkapita suatu daerah, dengan

tingginya pendapatan perkapita maka daya beli atau pendapatan suatu masyarakat akan meningkat, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

2. Produk Domestik regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini tidak sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa semakin besar PDRB berarti akan mengurangi tingkat kemiskinan, akan tetapi besar atau kecilnya kenaikan tersebut harus memperhatikan sejauh mana peran PDRB terhadap pendapatan yang menyebar kelapisan masyarakat sehingga PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga.
3. Upah Minimum Regional (UMR) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Yang pada dasarnya upah minimum bisa dilihat dari dua sisi, sisi yang pertama adalah mempertahankan nilai upah agar tidak turun dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sisi ke dua sebagai alat untuk mempertahankan nilai produktivitas pekerja. Jadi bisa dilihat upah yang diterima para pekerja tergantung dari kebutuhan dia sehari-hari, apabila harga-harga kebutuhan primer naik maka mereka mengurangi konsumsi mereka.
4. Jumlah Industri Sedang dan Besar (IN) berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pembangunan industri dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor seperti sektor perdagangan, sektor pertanian, atau pun sektor jasa. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya jumlah industri disuatu daerah dapat mempercepat

pertumbuhan ekonomi, yang secara tidak langsung dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di suatu daerah.

5.2 Saran

1. Penerimaan Daerah (PD) berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Untuk hal itu Pemerintah harus memaksimalkan sektor-sektor yang ada agar mendorong kenaikan Penerimaan Daerah.
2. Produk Domestik regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini tidak sesuai dengan teori yang mana PDRB mempengaruhi tingkat kemiskinan.
3. Upah Minimum Regional (UMR) tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan naiknya UMR diikuti dengan kenaikan harga barang pokok.
4. Jumlah Industri Sedang dan Besar (IN) berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pembangunan industri dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor seperti sektor perdagangan, sektor pertanian, atau pun sektor jasa.



Arsyad, Lincolin 2010 “*Ekonomi pembangunan*”. Yogyakarta : STIE YKPN 2004

BAPPENAS 2004 “Laporan Pembangunan Manusia”

Dwi Wijayanto, Ravi (2010) dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008*”. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 2010

Hartomo dan Aziz 1997 “*Ilmu sosial dasar*”. Jakarta : Bumi Aksara 1990

Hudaya, Dadan (2009) dalam penelitian yang berjudul "*Fakor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia*". Fakultas Ekonomi dan Manegemen Institut Pertanian Bogor 2009

James M. Kauffman 1999 "*Pengantar Pendidikan Khusus*". Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Kharibi,Ahmad 2011 dalam penelitian yang berjudul "*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan*". Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surakarta 2013

Kuncoro, Mudrajad 1997 "*Ekonomi pembangunan: teori, masalah, dan kebijakan*". Unit Penerbit Dan Percetakan PN

N. Gregory Mankiw 2003 "*Pengantar Ekonomi jilid 1*". Jakarta : Erlangga. Year, : 2003

N. Gregory Mankiw 2006 "*Pengantar Ekonomi Makro (Edisi 3)*". Salemba Empat, 2006

Sudantoko 2009 "*Dasar-dasar pengantar ekonomi pembangunan*". Jakarta : PP. Mardi Mulyo, 2009

Sukirno, Sadono 1994 "*Pertumbuhan ekonomi : Definisi, Sumber Pertumbuhan Ekonomi, dan Manfaat Pertumbuhan Ekonomi*". Jakarta : RajaGrafindo Persada



Sumaryati, Criswardani 2005 “ *Memahami kemiskinan Secara Multidimensional*”.

Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan 2005, VIII(3)

Sumodiningrat, Gunawan 1998 “*Membangun perekonomian rakyat*”. Yogyakarta

: Diterbitkan oleh Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA

Peraturan Pemerintah tahun 1999 “*Tentang Pendidikan*”

Provinisi Jawa Tengah Dalam Angka. BPS Provinsi DKI Jakarta.

PP No 13 tahun 2006 “*Tentang Laporan Keuangan*”

PP No 58 tahun 2005 “*Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*”

UU No 13 tahun 2003 “*Tentang Ketenagakerjaan*”

Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*.

Jakarta: Ghalia Indonesia.

Thamrin 2001 “*Analisis Perimbangan Keuangan*”. Jakarta: Bumi Aksara, 2001

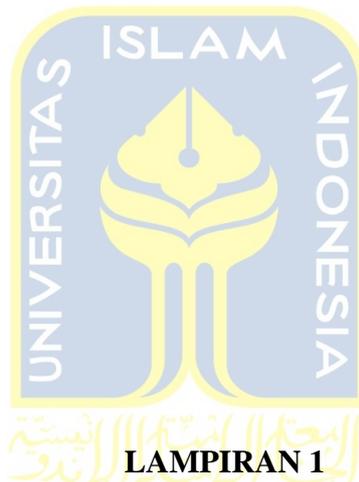
Tisna Amijaya, Deny (2008) dalam penelitian yang berjudul “*Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2003-2004*”.

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 2008

Todaro 1998 “*Pembangunan ekonomi di dunia ketiga Volume 1*”. Erlangga, 1998

Todaro 2007 “ *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga edisi 6 jilid1*”. Erlangga,
2007

Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya*. Jakarta :
Ekosiana.



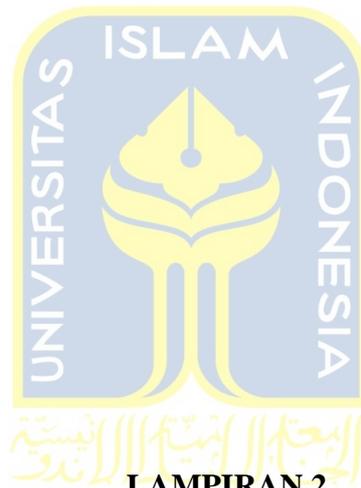
Tabel 1.1

**Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 1999-2015**

Tahun	Penduduk (ribu orang)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase (%)
1999	30.761,22	8.755,40	28,46
2000	30.775,84	8.254,20	26,82
2001	31.063,81	7.946,80	25,58
2002	31.691,86	7.038,30	22,21
2003	32.052,84	6.979,80	21,78
2004	32.397,43	6.843,80	21,12
2005	32.908,85	6.533,50	20,35
2006	32.177,73	7.100,60	22,07
2007	32.380,27	6.557,20	20,25
2008	32.626,39	6.122,50	18,77

2009	32.864,56	5.655	17,21
2010	32.382,65	5.217,20	16,11
2011	32.643,61	5.256	16,10
2012	33.270,20	4.863	14,62
2013	33.264,33	4.952	14,89
2014	33.552,66	4.811,30	14,34
2015	33.774,14	4.581,80	13,57

Sumber : BPS dalam angka Jawa Tengah (data diolah)



LAMPIRAN 2

Tabel 4.1

Data Tingkat Kemiskinan, Penerimaan Daerah, PDRB, Upah Minimum Regional, Jumlah Industri Besar Sedang Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Penerimaan Daerah (juta rupiah)	PDRB (juta rupiah)	Upah Minimum Regional (ribu rupiah)	Jumlah Industri Besar Sedang (unit)
1999	28,46	886.260	83.628.000.000	153.000	3.744
2000	26,82	1.081.631	100.000.000.000	185.000	3.155
2001	25,58	1.508.025	105.384.000.000	247.000	3.572
2002	22,21	1.904.806	107.275.000.000	314.500	3.537
2003	21,78	2.403.289	112.612.000.000	340.400	3.399

2004	21,12	2.883.599	118.398.000.000	365.000	3.476
2005	20,35	3.526.839	133.243.000.000	390.000	3.544
2006	22,07	3.814.479	139.016.000.000	450.000	5.537
2007	20,25	4.367.206	145.345.000.000	500.000	5.168
2008	18,77	5.203.027	152.627.000.000	547.000	4.678
2009	17,21	5.696.660	154.062.000.000	575.000	4.213
2010	16,11	6.229.527	162.285.000.000	660.000	3.887
2011	16,1	7.038.908	172.351.000.000	675.000	3.850
2012	14,62	11.649.479	184.078.000.000	765.000	3.736
2013	14,89	13.343.358	195.556.000.000	914.275	3.666
2014	14,34	15.157.460	209.991.000.000	1.006.603	3.851
2015	13,57	17.097.686	220.081.000.000	1.224.532	3.715

Sumber : BPS dalam angka Jawa Tengah (data diolah)



LAMPIRAN 3

Tabel 4.2

Uji Signifikansi MWD Untuk Regresi Model Linear

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/04/18 Time: 00:48
Sample: 1999 2015
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3394.738	398.0070	8.529341	0.0000
X1	8.72E-05	2.63E-05	3.315955	0.0069
X2	-10.57670	5.718534	-1.849547	0.0914
X3	-1.489430	0.673307	-2.212113	0.0490
X4	0.118884	0.055351	2.147832	0.0549

Z1	1891.756	1608.140	1.176363	0.2643
R-squared	0.958232	Mean dependent var	1966.176	
Adjusted R-squared	0.939246	S.D. dependent var	453.5474	
S.E. of regression	111.7920	Akaike info criterion	12.54172	
Sum squared resid	137472.0	Schwarz criterion	12.83580	
Log likelihood	-100.6046	Hannan-Quinn criter.	12.57095	
F-statistic	50.47128	Durbin-Watson stat	0.786120	
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN 4
Tabel 4.3
Hasil Uji MWD log linear

Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 12/04/18 Time: 00:50
Sample: 1999 2015
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.620630	0.086501	88.09918	0.0000
LOG(X1)	0.045083	0.002672	16.87136	0.0000
LOG(X2)	-0.124791	0.021639	-5.766900	0.0001
LOG(X3)	-0.428368	0.011214	-38.20050	0.0000
LOG(X4)	0.307230	0.008332	36.87343	0.0000
Z2	-0.000555	3.61E-05	-15.37558	0.0000
R-squared	0.999725	Mean dependent var	7.559092	
Adjusted R-squared	0.999600	S.D. dependent var	0.229066	
S.E. of regression	0.004580	Akaike info criterion	-7.663696	
Sum squared resid	0.000231	Schwarz criterion	-7.369620	
Log likelihood	71.14141	Hannan-Quinn criter.	-7.634464	
F-statistic	8002.612	Durbin-Watson stat	2.470530	
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN 5
Tabel 4.4
Hasil Regresi Model Linear

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/04/18 Time: 00:40
Sample: 1999 2015
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3475.906	398.2000	8.729047	0.0000
X1	9.42E-05	2.60E-05	3.620745	0.0035
X2	-11.98256	5.680993	-2.109238	0.0566
X3	-1.418262	0.681223	-2.081935	0.0594
X4	0.129349	0.055498	2.330689	0.0380

R-squared	0.952977	Mean dependent var	1966.176
Adjusted R-squared	0.937303	S.D. dependent var	453.5474
S.E. of regression	113.5658	Akaike info criterion	12.54257
Sum squared resid	154766.3	Schwarz criterion	12.78763
Log likelihood	-101.6119	Hannan-Quinn criter.	12.56693
F-statistic	60.79846	Durbin-Watson stat	1.276255
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN 6

Tabel 4.5

Uji multikolenaritas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.964895	0.964647	-0.000754
X2	0.964895	1.000000	0.989952	0.154610
X3	0.964647	0.989952	1.000000	0.124196
X4	-0.000754	0.154610	0.124196	1.000000

LAMPIRAN 7

Tabel 4.6

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.922619	Prob. F(4,12)	0.4825
Obs*R-squared	3.998483	Prob. Chi-Square(4)	0.4062
Scaled explained SS	1.940694	Prob. Chi-Square(4)	0.7467

LAMPIRAN 8

Tabel 4.7

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.284467	Prob. F(2,10)	0.3188
Obs*R-squared	3.474589	Prob. Chi-Square(2)	0.1760